

**ANALISIS DUKUNGAN UNI EROPA TERHADAP UKRAINA PADA
KONFLIK ESKALASI TAHUN 2022-2024**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Amanda Raiska Salsabilla

20323263

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

ANALISIS DUKUNGAN UNI EROPA TERHADAP UKRAINA PADA

KONFLIK ESKALASI TAHUN 2022-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

Amanda Raiska Salsabilla

20323263

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS DUKUNGAN UNI EROPA TERHADAP UKRAINA PADA
KONFLIK ESKALASI TAHUN 2022-2024

Dipertahankan di depan Dewan penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan,
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi,



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan penguji

1. Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A. Ph.D.
3. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Raiska Salsabilla

NIM : 20323263

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas. Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 April 2025



Amanda Raiska Salsabilla

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	ii
JUDUL SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
GLOSARIUM	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	17
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	17
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	18
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	18
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	19
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB II. BENTUK-BENTUK DUKUNGAN UNI EROPA TERHADAP UKRAINA PADA ESKALASI KONFLIK TAHUN 2022-2024	21
2.1 Eskalasi Konflik Tahun 2022-2024	21
2.2 Dukungan Uni Eropa (UE) pada Eskalasi Konflik Tahun 2022-2024 dalam Teori The Rational Design of International Institutions	23
<i>2.2.1 Dukungan Ekonomi Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	23

2. 2. 2	<i>Dukungan Keamanan dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	26
2. 2. 3	<i>Dukungan Politik dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	29
2. 2. 4	<i>Dukungan Kemanusiaan dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	31
2. 3	Dampak Dukungan Uni Eropa (UE) ke Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions	33
2. 3. 1	<i>Dampak Dukungan Ekonomi Uni Eropa terhadap Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	33
2. 3. 2	<i>Dampak Dukungan Keamanan Uni Eropa terhadap Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	34
2. 3. 3	<i>Dampak Dukungan Politik Uni Eropa terhadap Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	34
2. 3. 4	<i>Dampak Dukungan Kemanusiaan Uni Eropa terhadap Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions</i>	35
BAB III. ANALISIS DUKUNGAN UNI EROPA TERHADAP UKRAINA BERDASARKAN TEORI THE RATIONAL DESIGN OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS		36
3. 1	Membership Ukraina dalam Pemberian Kandidat Keanggotaan Uni Eropa	36
3. 2	Scope Uni Eropa dalam Eskalasi Konflik Rusia Ukraina di Berbagai Sektor	40
3. 3	Centralization Enforcement Uni Eropa terhadap Negara-Negara Pendukung Ukraina	43
3. 4	Control Uni Eropa terhadap Hak Keputusan Kolektif dalam Konsensus Ukraina	46
3. 5	Flexibility Institusi Internasional Uni Eropa pada Perubahan Geopolitik dalam Mendukung Ukraina	49
BAB IV. PENUTUP		52
4. 1	Kesimpulan	52
4. 2	Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA		57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sanksi Uni Eropa ke Rusia	25
--------------------------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dukungan tentara EU ke Ukraina tahun 2022	28
Gambar 2.2 Bantuan Tank dari EU ke Ukraina tahun 2022.....	28

GLOSARIUM

Cakupan Isu	: <i>Scope</i>
EBRD	: Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
EC	: <i>European Commission</i>
EPF	: <i>European Peace Facility</i>
EIB	: Bank Investasi Eropa
Eskalasi	: Perebutan wilayah
EUMAM Ukraine	: <i>Military Assistance Mission for Ukraine</i>
Fleksibilitas	: <i>Flexibility</i>
Invasi	: Penyerangan wilayah
Keanggotaan	: <i>Membership</i>
Komite Pengarah	: <i>Steering Committee</i>
Kontrol	: <i>Control</i>
MFA	: <i>Macro-Financial Assistance</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
PPF	: <i>Ukraine Project Preparation Facilities</i>
Sentralisasi	: <i>Centralization</i>
SL	: <i>Solidarity Lanes</i>
TPD	: <i>Temporary Protection Directive</i>
UE	: <i>European Union / Uni Eropa</i>
UNHCR	: Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi
Unit Persiapan Proyek:	<i>Project Preparation Unit</i>
UNSC/PBB	: <i>United Nations Security Council</i>
UIF	: <i>Ukraine Investment Framework</i>
URP	: <i>Ukraine Recovery Platform.</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>
WTO	: Organisasi Perdagangan Dunia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina pada eskalasi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022–2024. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori *The Rational Design of International Institutions*, penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk, alasan, dan dampak dukungan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa memberikan bantuan ekonomi melalui paket *Macro-Financial Assistance*, dukungan militer melalui *European Peace Facility*, serta bantuan kemanusiaan dengan penerapan *Temporary Protection Directive* untuk pengungsi Ukraina. Secara politik, Uni Eropa mempererat hubungan dengan memberikan status kandidat anggota kepada Ukraina. Dukungan ini memperkuat stabilitas ekonomi Ukraina, meningkatkan kapasitas pertahanan, memperbaiki krisis kemanusiaan, serta mendorong isolasi Rusia di tatanan internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa tidak hanya didasarkan pada prinsip solidaritas, tetapi juga pada kepentingan strategis untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Eropa.

Kata kunci: Bantuan Internasional, Eskalasi Konflik, Uni Eropa, Rusia, Ukraina,

ABSTRACT

This study discusses the European Union's support for Ukraine during the escalation of the Russia-Ukraine conflict in 2022–2024. Using a qualitative research method with the approach of The Rational Design of International Institutions theory, this study aims to understand the forms, reasons, and impacts of EU support. The results of the study show that the European Union provides economic assistance through the Macro-Financial Assistance package, military support through the European Peace Facility, and humanitarian assistance by implementing the Temporary Protection Directive for Ukrainian refugees. Politically, the European Union strengthens relations by granting candidate member status to Ukraine. This support strengthens Ukraine's economic stability, increases defense capacity, improves the humanitarian crisis, and encourages Russia's isolation in the international order. This study confirms that EU support is not only based on the principle of solidarity, but also on strategic interests to maintain security and stability in the European region.

Keyword: Conflict Escalation, European Union, International Aid, Russia, Ukraine,

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2014 berawal dari Revolusi Euromaidan, yaitu gelombang protes di Ukraina yang menggulingkan Presiden Viktor Yanukovich setelah ia menolak menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa dan lebih memilih mempererat hubungan dengan Rusia. Krisis politik ini memicu ketegangan yang lebih luas, di mana Rusia mencaplok Semenanjung Krimea pada Maret 2014 melalui referendum yang tidak diakui secara internasional (Chicago, 2014:78). Aneksasi ini dilakukan dengan cepat oleh Rusia dengan mengerahkan pasukan tanpa tanda pengenal, yang kemudian dikenal sebagai "*little green men*", untuk mengambil alih fasilitas militer dan infrastruktur pemerintahan Ukraina di Krimea (Sakwa, 2015:103). Selain Krimea, konflik juga meluas ke wilayah Donetsk dan Luhansk di timur Ukraina, di mana kelompok separatis pro-Rusia mendeklarasikan kemerdekaan dengan dukungan militer dari Rusia. Pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis semakin meningkat, yang kemudian dikenal sebagai Perang di Donbas. Rusia diduga memberikan senjata, logistik, dan bahkan personel militer kepada separatis, meskipun pemerintah Rusia membantah keterlibatannya secara langsung (Allison, 2014:128).

Konflik Rusia-Ukraina tahun 2014 menjadi titik awal ketegangan geopolitik yang lebih besar, yang akhirnya memuncak pada invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022. Meskipun terjadi upaya diplomasi, aneksasi Krimea

tetap menjadi salah satu sengketa utama dalam hubungan Rusia-Ukraina, dengan komunitas internasional terus mengecam tindakan Rusia dan mempertahankan sanksi terhadap Moskow (Charap & Colton, 2018:94).

Eskalasi konflik Rusia-Ukraina merujuk pada peningkatan ketegangan sejak aneksasi Krimea pada 2014, yang mencapai puncaknya dengan penyerangan penuh Rusia pada 24 Februari 2022. Rusia berupaya memperluas pengaruhnya, sementara Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat, melakukan perlawanan. Konflik ini berdampak pada stabilitas global, perdagangan energi, dan hubungan diplomatik internasional

Eskalasi konflik Rusia-Ukraina merupakan salah satu peristiwa besar yang terjadi pada tahun 2022. Perseteruan yang memanas sejak dilakukannya invasi (penyerangan) Rusia terhadap Ukraina terbukti melibatkan aksi kekerasan di beberapa wilayah, dan memberikan hentakan bagi seluruh dunia untuk membantu proses perdamaian. Gencaran usaha yang berjalan telah berupaya untuk mendorong perdamaian tanpa aksi kekerasan, membantu korban yang mengalami kerugian, serta menjaga negara lain dari dampak peperangan (Hutabarat, 2022:45).

Konflik yang terjadi antara dua negara yang bertetangga ini bermula sejak November 2021, dimana saat itu citra satelit menunjukkan terdapat penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Selanjutnya, Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah melakukan mobilisasi 100.000 tentaranya bersama dengan peralatan perang lainnya. Hal ini kemudian membuat gempar dunia internasional khususnya Barat, Amerika Serikat melalui Presiden Joe

Biden saat itu merespon kejadian ini dengan memperingatkan Rusia mengenai sanksi ekonomi yang akan didapatnya apabila menyerang Ukraina (Aljazeera, 2022:23).

Pada saat itu, isu Rusia yang akan menyerang Ukraina terus bergulir dan bertambah serius dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Terlebih, memang pada awal Januari 2022 Rusia bersama dengan negara tetangga yang sekaligus sekutunya yakni Belarusia, tengah melakukan latihan militer besar-besaran. Selain itu diperkirakan sebanyak 106.000 tentara angkatan darat serta 21.000 personel angkatan laut dan udara dikerahkan di berbagai daerah sekitar Ukraina. Hal tersebut sontak membuat Ukraina cemas, karena personel Rusia telah menyebar baik di utara, selatan, maupun timur negaranya (Brown, 2022:57).

Hal yang dilakukan Rusia ini tentunya melanggar kedaulatan negara Ukraina, dan tindakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Konflik yang terjadi saat ini turut membuat masyarakat sipil banyak menjadi korban. Berdasarkan data dari *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner* per tanggal 20 Mei tercatat sebanyak 8.189 korban sipil dengan rincian 3.838 tewas dan 4.351 terluka (Munaiseche, 2022:112). Sebagian besar korban sipil ini disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan area dampak yang luas, seperti penembakan dari artileri berat serta serangan rudal dan udara.

Perang berlanjut pada tahun 2023-2024, Ukraina melancarkan serangan balasan di wilayah selatan dan timur, termasuk wilayah Kherson dan

Zaporizhzhia. Rusia mempertahankan kontrol di sebagian besar wilayah yang dikuasai, menggunakan strategi perang berkepanjangan dan serangan drone yang intensif (Widiasa, 2018:89). Konflik Rusia-Ukraina pada 2024 masih berada dalam ketegangan tinggi tanpa tanda-tanda resolusi cepat. Perubahan strategis Ukraina mulai menyerang wilayah Rusia, termasuk di Kursk, sebagai langkah strategis untuk mengalihkan perhatian Rusia dari garis depan di Donbas. Hal ini juga dirancang untuk meningkatkan moral pasukan Ukraina dan mendapatkan posisi negosiasi lebih baik dengan dukungan persenjataan Barat.

Uni Eropa adalah organisasi politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 negara anggota Eropa. Pada periode tahun 2022 hingga 2024, Uni Eropa (UE) memiliki total 27 negara anggota. Jumlah ini tetap stabil sejak keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa melalui proses *Brexit* yang resmi berlaku pada 31 Januari 2020. Tidak ada negara baru yang bergabung dalam Uni Eropa selama rentang waktu 2022–2024, meskipun beberapa negara seperti Ukraina, Moldova, dan Georgia diberikan status kandidat untuk keanggotaan (European Commission, 2023:5). Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kerja sama antar negara anggota. Uni Eropa didirikan berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas. Negara-negara anggota Uni Eropa menggunakan mata uang yang sama, euro, dan bekerja sama di berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, dan keamanan (Eeas.europa.eu, 2023).

European Union atau disebut juga Uni Eropa (UE) merupakan integrasi regional negara Eropa dan menjadi salah satu aktor yang ikut terlibat cukup aktif di dalam penanganan konflik antara Ukraina dan Rusia. Secara geografis keduanya terletak di kawasan yang merupakan dan berbatasan langsung dengan Eropa, sehingga Uni Eropa merasa perlu untuk menentang keadaan dari konflik eskalasi ini. Uni Eropa pun kemudian mengambil langkah dengan mendukung aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Ukraina dan mengakui pemerintahan baru dari Ukraina, Uni Eropa merespon tindakan Rusia dengan pemberian sanksi-sanksi baik kepada Rusia.

Uni Eropa berpartisipasi dalam penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia berdasarkan kepentingan strategis, moral dan ekonomi. *Pertama*, Uni Eropa menganut prinsip-prinsip perdamaian, keadilan dan integritas wilayah, yang telah dilanggar oleh eskalasi konflik Rusia ke Ukraina, termasuk aneksasi Krimea. *Kedua*, konflik ini mempunyai dampak luas terhadap stabilitas di Eropa Timur dan mengancam keamanan seluruh kawasan. Uni Eropa berkomitmen membantu Ukraina mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. *Ketiga*, ada aspek ekonomi yang penting.

Keterlibatan Uni Eropa (UE) dalam mendukung Ukraina salah satu diantaranya adalah Ukraina sedang proses masuk kedalam keanggotaan Uni Eropa yang berdiri secara *independent* dan diakui oleh negara yang masuk dan terlibat dalam pengelompokan Uni Eropa (UE). Uni Eropa (UE) hadir dalam mendukung Ukraina pada eskalasi konflik dengan Rusia karena berbagai alasan strategis, historis, dan prinsip hukum internasional. Keterlibatan ini tidak hanya

strategis tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang UE dalam membangun keamanan kolektif di kawasan. Uni Eropa memainkan peran penting dalam membela Ukraina dalam konflik dengan Rusia sejak eskalasi besar pada 2022 hingga 2024. Tindakan ini mencerminkan kepentingan geopolitik UE dalam stabilitas kawasan dan pertahanan nilai-nilai dasar Eropa.

Pembahasan mengenai dukungan Uni Eropa (UE) terhadap Ukraina menjadi penting karena mencerminkan dinamika geopolitik Eropa modern, sekaligus menunjukkan peran strategis institusi regional dalam menjaga stabilitas kawasan. Konflik eskalasi Rusia terhadap Ukraina sejak 2022 tidak hanya mengancam kedaulatan satu negara, tetapi juga mengguncang tatanan keamanan dan hukum internasional yang telah lama dijaga pasca-Perang Dingin. Dalam konteks ini, dukungan UE terhadap Ukraina tidak dapat dilepaskan dari kepentingan jangka panjang Uni Eropa dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan integritas wilayah negara anggota maupun mitra strategisnya. UE memandang Ukraina sebagai bagian penting dari kawasan perbatasan Timur Eropa yang memiliki peran strategis dalam menahan ekspansi pengaruh Rusia. Selain itu, Ukraina telah menunjukkan aspirasi kuat untuk terintegrasi ke dalam sistem Eropa melalui reformasi dan kerja sama sejak 2014. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan UE, baik dalam bentuk ekonomi, keamanan, politik, maupun kemanusiaan, merupakan refleksi dari tanggung jawab kolektif serta bentuk solidaritas institusional terhadap negara mitra yang sedang menghadapi agresi eksternal. Pembahasan ini penting tidak hanya untuk memahami dimensi politik luar negeri Uni Eropa,

tetapi juga untuk mengkaji bagaimana desain institusi internasional seperti UE berfungsi secara rasional **dalam merespons krisis global.**

Ketertarikan menulis tentang *decision-making process* dan desain institusional Uni Eropa dalam kajian LBM muncul karena UE merupakan contoh unik dari institusi supranasional yang kompleks namun rasional. Proses pengambilan keputusan di dalamnya melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda, sehingga sering kali tidak mudah dicapai, terutama dalam isu luar negeri dan keamanan yang memerlukan konsensus. Meski begitu, melalui struktur yang terpusat dan sistem hukum yang mengikat, UE mampu merespons krisis seperti konflik Rusia–Ukraina secara sistematis. Hal ini menjadikan UE relevan untuk dikaji melalui pendekatan *The Rational Design of International Institutions* karena menunjukkan bagaimana institusi internasional dapat berfungsi secara efektif meskipun menghadapi dinamika internal yang kompleks.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis akan menjelaskan tentang **“Analisis Dukungan Uni Eropa Terhadap Ukraina pada Eskalasi Konflik Tahun 2022-2024.”**

1. 2 Rumusan Masalah

Bagaimana Uni Eropa mendukung Ukraina pada Eskalasi Konflik Tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah diketahui latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan peranan Uni Eropa mendukung Ukraina pada eskalasi konflik tahun 2022-2024.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk dukungan Uni Eropa pada eskalasi konflik tahun 2022-2024.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak akibat dukungan Uni Eropa pada eskalasi konflik tahun 2022-2024.

1.4 Cakupan Penelitian

Konflik Rusia-Ukraina tahun 2014 dan 2022 menunjukkan perbedaan signifikan dalam skala, tujuan, keterlibatan internasional, dan dampak geopolitik. Pada 2014, respons Uni Eropa terbatas pada sanksi ekonomi terhadap Rusia, penandatanganan Perjanjian Asosiasi dengan Ukraina, serta bantuan keuangan dan reformasi struktural. Namun, pada 2022, setelah invasi penuh Rusia, dukungan UE meningkat drastis. UE tidak hanya memperluas sanksi, tetapi juga memberikan bantuan militer melalui European Peace Facility, dukungan ekonomi melalui Macro-Financial Assistance, serta perlindungan bagi pengungsi melalui Temporary Protection Directive. Uni Eropa juga memberikan status kandidat anggota kepada Ukraina, mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap integrasi politik dan ekonomi negara tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Guna memperoleh landasan ilmiah perihal penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian keterkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian pertama milik Ali Muhammad dan Muhammad F. Athifi (2021) “Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Krisis Ukraina bermula sejak November 2013. Saat itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovich membatalkan untuk membuat kesepakatan Kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Yanukovich justru memutuskan untuk menerima pinjaman utang dari Rusia sebanyak \$15 miliar. Rusia memberikan utang tersebut sebagai bentuk kompensasi karena Ukraina batal melakukan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Dukungan Moskow terhadap gerakan separatis Ukraina telah membuat negara-negara tetangga seperti Azerbaijan, Georgia, dan Moldova, menghentikan ketergantungan mereka terhadap Rusia dan memulai kerja sama dengan Barat. Kremlin menganggap aneksasi di Krimea sebagai serangan langsung terhadap Barat, termasuk juga Ukraina. Putin meyakini bahwa dirinya dan Rusia memperoleh hasil lebih dari konfrontasi dengan AS dan Eropa, konsolidasi posisi politik dan meningkatnya status internasional Moskow. Sanksi tersebut berupa larangan penyediaan teknologi untuk eksplorasi minyak dan gas, larangan pemberian kredit kepada perusahaan minyak Rusia dan bank negara, serta pembatasan perjalanan pada

warga Rusia berpengaruh yang dekat dengan Presiden Putin dan terlibat dalam aneksasi Krimea. Benar bahwa sanksi tersebut sempat memukul perekonomian Rusia, namun sanksi Barat ternyata memiliki konsekuensi strategis bagi hubungan internasional Rusia, yaitu penguatan hubungan ekonomi dan militer dengan Republik Rakyat Tiongkok. Menguatnya hubungan antara kedua *great power* tersebut berdampak penting bagi peta politik dunia kontemporer yang multipolar ini.

Penelitian kedua milik Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, dan Muhammad Ashry Sallatu (2022) “Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina”. Hasil penelitian tersebut diperoleh krisis Ukraina merupakan salah satu topik hangat dalam perbincangan dunia internasional. Pembatalan penandatanganan *Association Agreement*, yaitu sebuah tahapan integrasi Ukraina kedalam Uni Eropa, mengakibatkan gelombang protes besar-besaran dari warga Ukraina. Perwakilan Uni Eropa yang menjadi penengah antara pemerintah Ukraina dan para pihak yang melakukan protes, akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk melengserkan presiden Viktor Yanukovych. Dilengserkannya Presiden Viktor Yanukovych yang disebut sebagai pro-Rusia, mengakibatkan kemarahan dari pihak Rusia, dengan alasan presiden terpilih pengganti Viktor Yanukovych merupakan pihak yang pro-Eropa. Setelah pemilihan, pasukan bersenjata tanpa identitas mengambil alih wilayah Krimea dan mengadakan referendum agar wilayah tersebut bergabung dengan Rusia. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini menyebabkan Uni Eropa memberi sanksi terhadap Rusia. Sanksi

berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada Rusia, namun juga terhadap Eropa, karena pada dasarnya masing-masing pihak merupakan salah satu mitra dagang paling besar. Sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia, akibat aneksasi Krimea oleh Rusia, menjadikan hubungan kedua negara berada pada titik terendahnya pasca perang dingin. Sanksi yang ditetapkan oleh Uni Eropa berdampak banyak pada perekonomian Rusia, diantaranya penurunan nilai mata uang Rusia terhadap US Dollar yang mencapai 50%. Namun, ada satu hal yang justru berdampak positif terhadap Rusia. Sejak ditetapkannya individu dan entitas yang mendapat sanksi dari Rusia, semangat cinta tanah air masyarakatnya justru meningkat, serta individu yang tercantum dalam sanksi tersebut merasa bahwa sanksi tersebut menjadi bukti bahwa mereka telah memiliki pengorbanan besar dan cinta terhadap Rusia.

Penelitian ketiga milik Faisal Nurdin Idris dan Muhammad Rafif Mu'tashim (2023) "Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia atas Pelanggaran Teritorial Ukraina: Pendekatan Multi-Tujuan". Hasil penelitian ini diperoleh Sanksi UE terhadap Rusia atas pelanggaran integritas teritorial Ukraina merupakan instrumen kebijakan luar negeri UE (CFSP) dalam merespon perilaku Rusia. Tulisan ini mengeksplorasi mengapa sanksi masih menjadi opsi kebijakan yang diterapkan dalam merespon tindakan Rusia atas Ukraina. Dengan menggunakan pendekatan multi-tujuan (*multi-purpose approach*), tulisan menunjukkan bahwa penerapan dan perpanjangan sanksi UE terhadap Rusia pada periode 2014-2016 tidak hanya bisa ditinjau dari aspek koersif. Dari uraian di atas, kami berargumen bahwa ketiga fungsi sanksi yaitu *coercing*,

constraining dan *signaling/stigmatizing* berperan pada konteks yang berbeda. Jika fungsi koersif dianggap kurang bekerja dalam mengubah perilaku Rusia dalam satu keadaan tertentu, fungsi *constraining* dan *signaling/stigmatizing* dapat lebih mengambil peran dalam menekan Rusia baik kepada audiens domestik ataupun internasional. Kajian ini dapat memberikan implikasi bagi kajian berikutnya dalam menginvestigasi tetap digunakannya sanksi yang diperluas dalam merespon invasi Rusia atas Ukraina dengan operasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.

Penelitian keempat milik Ali Martin dan Salman Al Farizi (2024) “Sikap Uni Eropa Terhadap Konflik Rusia dan Ukraina”. Hasil penelitian ini diperoleh Uni Eropa melakukan sanksi dan kecaman terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Sanksi ini dilakukan hanya untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Eropa akibat dari invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Dengan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia sebagai bentuk dan upaya untuk menjaga keamanan di kawasan Eropa. Konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 telah menyebabkan Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia, salah satu sanksi yang diberikan termasuk pelarangan import minyak Rusia yang dibawa melalui laut. Selain embargo ekonomi, Uni Eropa juga memberikan sanksi ekonomi agar mengurangi biaya dalam invasi terhadap Ukraina. Dan Uni Eropa juga memberikan bantuan militer terhadap Ukraina, bahkan bantuan berupa kesehatan dan keselamatan kepada warga Ukraina. Bentuk sikap Uni Eropa untuk mengurangi biaya pengeluaran Rusia dan juga mengurangi beban Ukraina sebagai wilayah timur Eropa.

Penelitian kelima Indah Puspasari (2020) “Peran Uni Eropa sebagai Institusi Supranasional dalam Krisis Ukraina Tahun 2014-2019”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwasannya UE sebagai institusi supranasional memiliki kewenangan untuk merespon Krisis Ukraina sebagaimana adanya kepentingan dari UE untuk menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan sekitarnya. Respon ini dapat terlihat dari dikeluarkannya kebijakan dan program-program yang ditujukan khusus untuk merespon Krisis Ukraina ini. Merujuk pada indikator dari *Responsibility to Protect*, dapat terbukti bahwasannya UE telah menerapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi isu kemanusiaan di Ukraina. Namun, dari sini, dapat terlihat bahwasannya tindakan tersebut dapat berjalan dua arah yakni mengatasi isu kemanusiaan sekaligus mengupayakan penghentian konflik di Ukraina. Dari upaya-upaya UE yang telah dijelaskan, dapat terlihat bahwa UE cukup cakap dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan indikator dari *Responsibility to Protect* tersebut. Walaupun, upaya ini belum berhasil mencapai perdamaian melihat kegagalan dari negosiasi damai kerap kali disebabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri yakni Ukraina dan Rusia.

Merujuk dalam penelitian terdahulu melalui beragam riset dan penelitian yang telah dipaparkan di atas. Maka, dapat disimpulkan bahwa awal krisis di Ukraina dipicu oleh banyak protes publik, kelompok, dan parlemen terhadap kebijakan Presiden Yanukovych, yang menyebabkan kekosongan posisi presiden untuk sementara digantikan oleh Turchinov hingga pemilihan presiden berikutnya. Beberapa wilayah di timur Ukraina, seperti Crimea, Donetsk,

Luhansk, dan Kharkiv, mencoba bergabung dengan Rusia. Namun, hanya Krimea yang berhasil mengadakan referendum dan bergabung dengan Rusia. Penelitian di atas tidak menjelaskan bagaimana dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina pada eskalasi konflik. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana bentuk dukungan Uni Eropa pada eskalasi konflik Ukraina-Rusia dalam kurun waktu 2022-2024, agar pembaca juga dapat memahami alasan Uni Eropa tersebut mendukung Ukraina pada eskalasi konflik tahun 2022-2024.

1. 6 Kerangka Pemikiran

Dalam penyusunan skripsi ini kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian yang sesuai sebagai berikut.

Teori *The Rational Design of International Institutions* oleh Barbara Koremenos, Charles Lipson, and Duncan Snida

Teori *The Rational Design of International Institutions* oleh Koremenos dkk. (2001) menjelaskan bahwa institusi internasional dibentuk secara rasional berdasarkan lima elemen utama: (*membership*) keanggotaan, (*scope*) cakupan isu, (*centralization*) sentralisasi, (*control*) kontrol, dan (*flexibility*) fleksibilitas. Dalam konteks dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina pada konflik 2022–2024, kelima elemen ini tampak jelas. *Membership* ditunjukkan dengan pemberian status kandidat UE kepada Ukraina tanpa keanggotaan penuh, karena belum memenuhi standar penuh UE. *Scope* mencakup bantuan ekonomi, militer, kemanusiaan, dan politik, sesuai dengan kebutuhan krisis. *Centralization* tampak melalui peran lembaga UE seperti *European*

Commission dan *European Peace Facility* dalam mengelola bantuan. **Control** dijalankan melalui mekanisme pengambilan keputusan kolektif antar negara anggota. Sementara itu, **flezibility** ditunjukkan melalui respons cepat UE terhadap dinamika konflik, seperti pengesahan bantuan darurat dan perlindungan pengungsi. Semua ini menunjukkan bahwa dukungan UE dirancang secara strategis dan rasional sesuai dinamika geopolitik yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui dokumen resmi Uni Eropa, laporan lembaga internasional, artikel jurnal akademik, serta publikasi media kredibel. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data dalam kerangka teori *The Rational Design of International Institutions* untuk menjelaskan strategi dan bentuk dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina selama eskalasi konflik 2022–2024.

1. 7 Argumen Sementara

Argumen sementara dalam penelitian ini adalah Uni Eropa mendukung Ukraina untuk melindungi kedaulatannya dan mencegah pelanggaran hukum internasional. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap elemen yang digunakan.

a. *Membership* (Keanggotaan)

Membership mengacu pada siapa yang diizinkan menjadi bagian dari institusi internasional. Dalam konteks ini, Ukraina bukan anggota penuh Uni Eropa (UE), tetapi telah diberikan status kandidat anggota UE pada 23 Juni 2022 oleh Dewan Eropa. Keputusan ini merupakan bagian dari respons UE

terhadap penyerangan Rusia yang dimulai pada Februari 2022 dan sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan blok Eropa, sebagai bagian dari respons UE terhadap eskalasi konflik. Status ini menunjukkan langkah strategis UE untuk mempererat hubungan dengan Ukraina tanpa memberikan keanggotaan penuh secara langsung.

b. *Scope* (Cakupan Isu)

Analisis elemen *scope* membantu menjelaskan bagaimana UE menangani isu-isu yang kompleks secara bersamaan untuk mendukung Ukraina. Cakupan yang luas ini mencerminkan strategi UE untuk merespons kebutuhan multidimensi Ukraina, sekaligus mengatasi tantangan geopolitik yang lebih besar akibat eskalasi Rusia.

c. *Centralization* (Sentralisasi)

Meskipun UE sering dianggap sebagai institusi yang terdesentralisasi, peran sentralisasi tetap signifikan dalam mendukung Ukraina. Badan-badan UE seperti *European Commission* dan *European Peace Facility* bertindak sebagai pusat koordinasi untuk mengelola bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan.

d. *Control* (Kontrol)

Dalam konteks dukungan Uni Eropa (UE) terhadap Ukraina selama eskalasi konflik 2022-2024, elemen ini sangat relevan untuk memahami bagaimana keputusan strategis dibuat di tengah tantangan geopolitik dan kepentingan yang beragam di antara negara anggota UE.

e. *Flexibility* (Fleksibilitas)

Situasi konflik Ukraina-Rusia sangat dinamis dan fleksibilitas memungkinkan UE untuk merespons situasi yang berkembang dengan cepat tanpa harus merombak struktur dasar institusi, menjaga keseimbangan antara adaptasi dan stabilitas kebijakan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009:99), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Creswell, 2015:45).

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Menurut (Yusuf, 2017:45) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang

menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian.

1. 8. 2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan. Subjek dalam penelitian ini adalah dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina pada eskalasi konflik tahun 2022-2024.

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid dan *reliable* (Sugiono, 2017:102). Objek dalam penelitian ini eskalasi konflik Rusia Ukraina tahun 2022-2024.

1.8. 3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data observasi, observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004:78). Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana, 2011:45).

Penelitian ini, menggunakan jenis data sekunder, data sekunder merupakan data yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari sumber data, melainkan dari pihak ketiga atau pengumpulan data. Dengan kata lain,

penelitian ini menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya. Data ini kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen dan tulisan lainnya yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk mengungkap objek penelitian.

1.8. 4 Proses Penelitian

Penelitian berjudul "*Analisis Dukungan Uni Eropa Terhadap Ukraina Pada Eskalasi Konflik Tahun 2022-2024*" dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Proses penelitian diawali dengan identifikasi latar belakang meningkatnya konflik antara Rusia dan Ukraina yang memicu keterlibatan Uni Eropa sebagai aktor regional utama. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup dokumen resmi Uni Eropa, laporan organisasi internasional, berita, artikel jurnal, serta publikasi relevan lainnya. Analisis difokuskan pada bentuk dukungan yang diberikan Uni Eropa kepada Ukraina, seperti bantuan finansial, militer, dan diplomatik, serta kebijakan sanksi terhadap Rusia.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini di bagi menjadi empat bagian sub bab utama, penjabarannya sebagai berikut.

BAB I

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara dan metode penelitian.

BAB II

Menjelaskan tentang bentuk-bentuk dukungan Uni Eropa pada eskalasi konflik tahun 2022-2024.

BAB III

Menjelaskan tentang dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina dalam eskalasi konflik tahun 2022-2024 dengan menggunakan teori “*The Rational Design of International Institutions*” milik Barbara Koremenos, Charles Lipson, and Duncan Snidal (2001).

BAB IV

Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan argumen untuk penelitian tersebut, yang mana kesimpulan berisi rangkuman singkat dari hasil penelitian dan rekomendasi yang memiliki saran untuk penelitian di masa depan yang memiliki bidang yang sama dengan penelitian ini.

BAB II

BENTUK-BENTUK DUKUNGAN UNI EROPA TERHADAP UKRAINA

PADA ESKALASI KONFLIK TAHUN 2022-2024

Konflik Rusia-Ukraina yang semakin meningkat sejak tahun 2022 telah mengubah dinamika geopolitik global dan menuntut respons dari berbagai aktor internasional, termasuk Uni Eropa. Sebagai salah satu entitas politik dan ekonomi terbesar di dunia, Uni Eropa memainkan peran krusial dalam mendukung Ukraina melalui berbagai kebijakan strategis, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, kemanusiaan, maupun politik. Dukungan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya tetapi juga untuk menjaga stabilitas di kawasan Eropa dan mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat berdampak pada keamanan global. Bab ini akan menguraikan berbagai bentuk dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina selama eskalasi konflik tahun 2022-2024, mencakup bantuan finansial, bantuan militer, kebijakan sanksi terhadap Rusia, serta berbagai inisiatif diplomatik dan kemanusiaan yang diterapkan oleh Uni Eropa dalam merespons krisis ini.

2. 1 Eskalasi Konflik Tahun 2022-2024

Eskalasi adalah proses meningkatnya intensitas suatu keadaan atau situasi, baik dalam bentuk konflik, ketegangan, atau perkembangan lainnya. Dalam konteks sosial dan politik, eskalasi sering dikaitkan dengan peningkatan skala, kompleksitas, atau tingkat kekerasan dalam suatu perselisihan. Eskalasi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan, provokasi, atau kegagalan diplomasi (Galtung, 1996:112).

Eskalasi konflik Rusia-Ukraina mengacu pada peningkatan ketegangan dan kekerasan antara kedua negara, yang memuncak dengan penyerangan penuh Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Konflik ini bermula sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Krimea dan mendukung kelompok separatistis di Donetsk dan Luhansk. Namun, pada 2022, Rusia melancarkan serangan skala besar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Ukraina dan memperluas wilayahnya di Eropa Timur (Mearsheimer, 2014:78). Eskalasi konflik ini ditandai dengan serangan militer besar-besaran, peningkatan penggunaan senjata berat, serta intervensi internasional. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Ukraina, sementara Rusia memperkuat aliansinya dengan negara-negara seperti Iran dan Tiongkok (European Council, 2022:15).

Eskalasi konflik Rusia-Ukraina 2022–2024 merupakan salah satu peristiwa politik paling kompleks dalam beberapa dekade terakhir, yang berakar pada sejarah panjang ketegangan antara kedua negara. Pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh dengan tujuan menggulingkan pemerintahan pro-Barat di Ukraina dan menghentikan aspirasi negara tersebut untuk bergabung dengan NATO. Dukungan Barat terhadap Ukraina menjadi penentu utama dalam dinamika konflik ini. Pada 2023, Ukraina berhasil merebut kembali beberapa wilayah penting, meskipun Rusia meningkatkan serangan udara yang menasar infrastruktur energi, menyebabkan krisis listrik di seluruh negeri. Selain itu, tekanan sanksi ekonomi terhadap Rusia oleh Uni Eropa berhasil melemahkan ekonomi Rusia, meskipun hal ini juga menyebabkan krisis energi di Eropa akibat ketergantungan yang tinggi terhadap gas Rusia.

Konflik ini juga membawa dampak global yang signifikan. Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat memperkuat pembentukan blok geopolitik baru, dengan Rusia dan China semakin mempererat hubungan strategisnya. Sementara itu, negara-negara berkembang menghadapi dampak dari gangguan rantai pasokan pangan, karena Ukraina adalah salah satu pengeksportir utama gandum dunia. Pada 2024, meskipun ada upaya diplomasi internasional untuk mencari solusi damai, konflik ini tetap berlanjut dengan kompleksitas tinggi. Peran negara-negara seperti Turki dan India juga semakin terlihat dalam memediasi konflik dan menjaga stabilitas global.

2. 2 Dukungan Uni Eropa (UE) pada Eskalasi Konflik Tahun 2022-2024 dalam Teori The Rational Design of International Institutions

2. 2. 1 Dukungan Ekonomi Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions

Uni Eropa memberikan dukungan ekonomi yang signifikan kepada Ukraina selama eskalasi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022–2024. Salah satu bentuk utamanya adalah pemberian *Macro-Financial Assistance* (MFA) yang mencapai miliaran euro, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro Ukraina dan mendukung anggaran negara selama masa perang (European Commission, 2023). Selain itu, UE menghapus tarif impor untuk produk ekspor Ukraina guna mempermudah akses ke pasar Eropa, serta membuka *Solidarity Lanes* untuk mempercepat ekspor produk pertanian dan bahan mentah (European Commission, 2022). Dukungan ini mencerminkan prinsip cakupan isu (*scope*) dalam teori *The Rational Design of International Institutions* oleh Koremenos, Lipson, dan Snidal

(2001), yang menjelaskan bahwa institusi cenderung memperluas bidang keterlibatan ketika menghadapi krisis yang kompleks dan melibatkan banyak aktor. Bantuan ekonomi UE juga dikelola melalui lembaga terpusat seperti *European Commission* dan *European External Action Service*, sejalan dengan konsep sentralisasi (*centralization*) dalam teori tersebut, yang menyatakan bahwa pengelolaan terpusat dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efektivitas koordinasi (Koremenos et al., 2001).

Meskipun Ukraina bukan anggota penuh Uni Eropa, statusnya sebagai kandidat dan penerima bantuan ekonomi menunjukkan bentuk keanggotaan terbatas (*membership*) yang dipilih secara strategis untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan serta ketidakpastian preferensi jangka panjang (Koremenos et al., 2001). Pengambilan keputusan atas dukungan tersebut dilakukan secara kolektif melalui mekanisme konsensus antar negara anggota, mencerminkan desain kontrol (*control*) dalam institusi internasional yang mempertimbangkan efisiensi dan representasi anggota. Di samping itu, UE menunjukkan tingkat fleksibilitas (*flexibility*) yang tinggi, dengan menyesuaikan kebijakan bantuan ekonomi secara cepat terhadap perkembangan konflik dan kondisi domestik Ukraina, sebagaimana disebutkan dalam teori bahwa fleksibilitas diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan situasi global (Koremenos et al., 2001). Dengan demikian, bentuk-bentuk dukungan ekonomi UE terhadap Ukraina menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirancang secara rasional dan terstruktur, sejalan dengan prinsip-prinsip institusional dalam kerangka desain internasional yang dijelaskan oleh Koremenos dkk.

Uni Eropa memberlakukan beberapa sanksi terhadap Rusia terkait eskalasi konflik ke Ukraina pada tahun 2022. Beberapa sanksi yang diberlakukan antara lain:

Tabel 1. Sanksi Uni Eropa ke Rusia

Jenis Sanksi	Tahun Penerapan	Dampak Penerapan Sanksi
Sanksi Keuangan – Pemutusan akses bank Rusia dari sistem SWIFT	2022	Membatasi transaksi internasional Rusia, menghambat perdagangan globalnya (European Council, 2022:17).
Sanksi Energi – Larangan impor minyak mentah dan produk minyak dari Rusia	2022-2023	Mengurangi pendapatan utama Rusia dari ekspor energi, melemahkan keuangan negara (European Commission, 2023:25).
Sanksi Perdagangan – Larangan ekspor teknologi canggih ke Rusia	2022	Membatasi akses Rusia ke komponen penting untuk industri militer dan teknologi tinggi (NATO, 2023:7).
Sanksi Perorangan – Pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi pejabat Rusia	2022-2024	Menekan elit politik dan ekonomi Rusia yang mendukung perang (European External Action Service, 2024:12).
Sanksi Transportasi – Larangan maskapai Rusia terbang di wilayah udara Uni Eropa	2022	Mengisolasi Rusia dari konektivitas udara global (European Commission, 2023:30).
Sanksi Media – Pemblokiran media pro-Rusia seperti RT dan Sputnik di UE	2022-2023	Membatasi penyebaran propaganda Rusia di Eropa (European Parliament, 2023:9).
Sanksi Militer – Larangan ekspor komponen militer ke Rusia	2022-2024	Menghambat kemampuan Rusia dalam memproduksi senjata modern (European Defence Agency, 2024:14).

Sumber: *European Commission* (2023)

Serangan Rusia telah merusak banyak infrastruktur penting Ukraina, termasuk jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan fasilitas kesehatan. Uni Eropa berkontribusi dalam pendanaan rekonstruksi melalui berbagai program bantuan,

termasuk kerangka kerja *Ukraine Recovery Platform*. *Ukraine Recovery Platform* adalah inisiatif yang dibentuk untuk mengoordinasikan dukungan internasional dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi Ukraina pasca konflik. Platform ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Ukraina, Uni Eropa, negara-negara G7, dan lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan Ukraina (European Commission, 2023:12).

Upaya ini bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur strategis yang vital bagi kelangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Program ini tidak hanya menciptakan stabilitas jangka pendek tetapi juga mendorong pembangunan jangka panjang (European Union, 2022:15). UE dan Negara-negara Anggotanya telah memobilisasi €39 miliar dukungan militer untuk Ukraina. Jumlah ini termasuk €6,1 miliar di bawah *European Peace Facility (EPF)* untuk mendukung pengiriman peralatan militer (European Defence Agency, 2024:14). Pada bulan Maret 2024, Dewan membentuk *Ukraine Assistance Fund* khusus senilai €5 miliar guna memperkuat dukungan militer kepada Ukraina (European Council, 2024:9). Terlebih dalam bidang militer Uni Eropa memberikan bantuan persenjataan (European External Action Service, 2024:15).

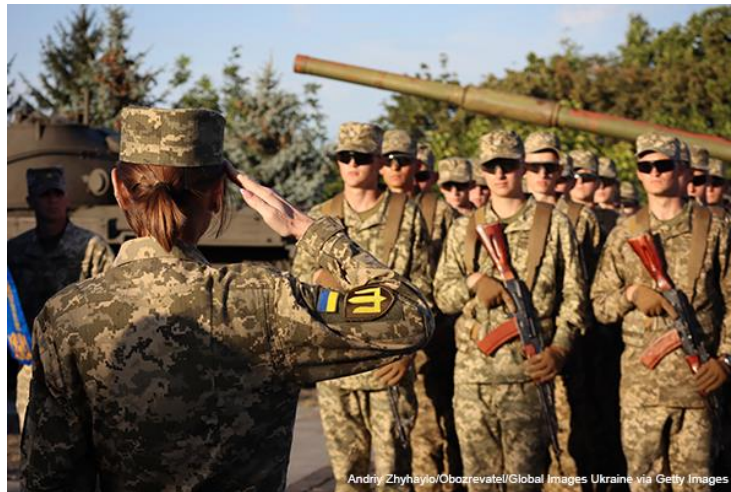
2. 2. 2 *Dukungan Keamanan dalam Teori The Rational Design of International Institutions*

Dalam menghadapi eskalasi konflik Rusia–Ukraina sejak 2022, Uni Eropa memberikan dukungan keamanan yang signifikan kepada Ukraina.

Dukungan ini mencakup pengiriman bantuan militer seperti amunisi, sistem pertahanan udara, kendaraan lapis baja, serta pelatihan militer melalui *European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine* (EUMAM Ukraine). Selain itu, pendanaan untuk pengadaan senjata dilakukan melalui *European Peace Facility* (EPF), sebuah mekanisme keuangan khusus yang memungkinkan negara-negara anggota UE membiayai bantuan militer kepada negara ketiga (European Council, 2023).

Dukungan keamanan ini sejalan dengan prinsip cakupan isu (*scope*) dalam teori *The Rational Design of International Institutions*, di mana institusi internasional memperluas bidang keterlibatan—dari ekonomi dan diplomasi ke aspek militer—ketika dihadapkan pada konflik yang multidimensi (Koremenos et al., 2001). Dalam konteks ini, perluasan cakupan bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina secara komprehensif dan meningkatkan efektivitas respons UE. Dari sisi sentralisasi (*centralization*), manajemen bantuan militer dikoordinasikan oleh badan-badan UE seperti *European External Action Service* (EEAS) dan *European Defence Agency*, yang berperan sebagai pusat distribusi, koordinasi logistik, dan pemantauan pelaksanaan bantuan. Ini mencerminkan argumen teori bahwa sentralisasi memperkuat efisiensi operasional dan mengurangi fragmentasi kebijakan (Koremenos et al., 2001).

Gambar 2.1 Dukungan tentara EU ke Ukraina tahun 2022



Sumber: detik.com, 2022.

Gambar 2.2 Bantuan Tank dari EU ke Ukraina tahun 2022



Sumber: detik.com, 2022.

Meskipun Ukraina bukan anggota NATO maupun UE, statusnya sebagai mitra strategis memungkinkan UE untuk menggunakan model keanggotaan fleksibel (*membership*), yaitu memberikan dukungan tanpa keharusan menjadi anggota penuh. Ini dilakukan untuk menghindari konflik formal sekaligus tetap menjamin keamanan kawasan. Teori *Rational Design* menyebutkan bahwa desain keanggotaan bisa disesuaikan untuk menghindari masalah enforcement

dan mengelola ketidakpastian preferensi (Koremenos et al., 2001). Dalam hal kontrol (*control*), keputusan pemberian bantuan keamanan dilakukan secara kolektif oleh negara-negara anggota UE, melalui mekanisme konsensus di Dewan Uni Eropa. Hal ini sejalan dengan prinsip kontrol yang menyeimbangkan efisiensi dan representasi negara anggota dalam pengambilan keputusan penting. Terakhir, dalam aspek fleksibilitas (*flexibility*), UE menunjukkan kemampuan tinggi untuk merespons perubahan dinamika militer, misalnya dengan memperbarui jumlah dan jenis bantuan sesuai eskalasi di medan perang. Ini sesuai dengan gagasan *adaptive flexibility* dalam teori, yaitu kemampuan institusi untuk bertindak cepat tanpa merombak struktur formal (Koremenos et al., 2001).

2. 2. 3 Dukungan Politik dalam Teori The Rational Design of International Institutions

Uni Eropa memberikan dukungan politik yang kuat kepada Ukraina selama eskalasi konflik 2022–2024 sebagai bagian dari upaya kolektif menegaskan kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut. Salah satu bentuk utama dari dukungan politik tersebut adalah pemberian status kandidat keanggotaan Uni Eropa kepada Ukraina pada Juni 2022. Langkah ini bersifat simbolis dan strategis, menandai komitmen jangka panjang Uni Eropa terhadap integrasi politik Ukraina ke dalam struktur Eropa (European Parliament, 2022). Selain itu, UE secara aktif menyuarakan dukungan di forum internasional, seperti PBB, serta mempererat kerja sama politik melalui platform bilateral dan multilateral. Dukungan politik ini mencerminkan elemen keanggotaan

(*membership*) dalam teori *The Rational Design of International Institutions*. Meskipun Ukraina belum menjadi anggota penuh, pemberian status kandidat mencerminkan desain keanggotaan yang fleksibel, dimana negara dapat dimasukkan secara bertahap dalam struktur institusional untuk menghindari masalah enforcement dan mengelola ketidakpastian preferensi (Koremenos et al., 2001). Ini menunjukkan bahwa institusi dapat memperluas pengaruh politik tanpa harus langsung menerima negara sebagai anggota tetap.

Dalam aspek cakupan isu (*scope*), dukungan politik UE merupakan bagian dari pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan isu-isu keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan. Cakupan yang luas ini mencerminkan asumsi teori bahwa semakin kompleks tantangan yang dihadapi, semakin luas pula ruang lingkup kerja institusi (Koremenos et al., 2001). Selain itu, sentralisasi (*centralization*) dukungan politik dilakukan melalui lembaga pusat seperti European Commission dan European Council yang menyatakan posisi resmi Uni Eropa secara kolektif, sehingga memperkuat legitimasi dan konsistensi sikap politik di hadapan aktor internasional lainnya. Dari sisi kontrol (*control*), keputusan politik strategis seperti pemberian status kandidat dan sanksi terhadap Rusia diambil melalui mekanisme pemungutan suara oleh negara anggota UE, yang mencerminkan prinsip desain institusional tentang pembagian kekuasaan dan perlunya konsensus dalam pengambilan keputusan (Koremenos et al., 2001). Terakhir, aspek fleksibilitas (*flexibility*) tampak dalam kemampuan UE merespons perkembangan politik dengan cepat, termasuk penyusunan deklarasi bersama, penyesuaian kebijakan luar negeri, dan adaptasi strategi diplomatik.

Fleksibilitas ini sesuai dengan kerangka teori yang menyebutkan pentingnya adaptasi institusi terhadap dinamika yang terus berubah dalam sistem internasional.

Dengan demikian, dukungan politik Uni Eropa terhadap Ukraina dirancang secara rasional dan strategis, menggunakan pendekatan institusional yang fleksibel, terkoordinasi, dan berbasis konsensus, sebagaimana dijelaskan dalam teori *The Rational Design of International Institutions*.

2.2.4 Dukungan Kemanusiaan dalam Teori *The Rational Design of International Institutions*

Selama konflik Rusia–Ukraina 2022–2024, Uni Eropa memberikan dukungan kemanusiaan dalam skala besar untuk merespons krisis pengungsi, korban sipil, dan kerusakan infrastruktur dasar. UE mengaktifkan *Temporary Protection Directive*, yang memberikan perlindungan hukum dan akses terhadap layanan sosial bagi jutaan pengungsi Ukraina di negara-negara anggota (European Commission, 2023). Selain itu, UE menyalurkan bantuan logistik dan medis, membangun koridor kemanusiaan, serta menyediakan pendanaan darurat melalui mekanisme *EU Civil Protection Mechanism* dan lembaga seperti *European Humanitarian Response Capacity*. Dukungan ini menunjukkan komitmen UE untuk menjawab krisis kemanusiaan secara sistematis dan terkoordinasi.

Dalam kerangka teori *The Rational Design of International Institutions*, dukungan kemanusiaan ini mencerminkan perluasan cakupan isu (*scope*) dari institusi internasional. Koremenos et al. (2001) menjelaskan bahwa ketika

institusi dihadapkan pada masalah kompleks dan krisis multidimensi, maka cakupan kebijakan cenderung diperluas agar mencakup isu-isu kemanusiaan, sosial, dan moral, bukan hanya politik dan ekonomi. Bantuan kemanusiaan UE juga dikelola secara terpusat (*centralization*) oleh lembaga seperti *European Commission* melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Sipil dan Operasi Bantuan Kemanusiaan Eropa (DG ECHO), mencerminkan pentingnya koordinasi pusat dalam respons krisis yang cepat dan efisien (Koremenos et al., 2001).

Meskipun Ukraina bukan anggota UE, negara tersebut tetap menerima dukungan penuh melalui mekanisme perlindungan bersama, yang merupakan bentuk keanggotaan fleksibel (*membership*)—sebuah strategi rasional yang memungkinkan partisipasi eksternal tanpa perlu memenuhi semua syarat formal keanggotaan. Pengambilan keputusan terkait distribusi bantuan dan perlindungan pengungsi dilakukan secara kolektif (*control*) oleh negara-negara anggota, menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang mempertimbangkan konsensus dan representasi anggota. Selain itu, respons cepat UE dalam merancang jalur bantuan, adaptasi kebijakan pengungsi, dan mobilisasi sumber daya menunjukkan adanya fleksibilitas (*flexibility*) institusional tinggi, sesuai teori bahwa adaptabilitas penting untuk menjaga efektivitas institusi dalam situasi tidak menentu (Koremenos et al., 2001).

Dengan demikian, bentuk dukungan kemanusiaan Uni Eropa terhadap Ukraina selama konflik bukan hanya tindakan solidaritas, tetapi juga bagian dari desain institusional yang rasional, fleksibel, dan terkoordinasi secara

internasional sesuai kerangka kerja *The Rational Design of International Institutions*.

2.3 Dampak Dukungan Uni Eropa (UE) ke Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions

Dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina selama konflik 2022–2024 memberikan dampak langsung yang sangat signifikan di berbagai bidang strategis.

2.3.1 Dampak Dukungan Ekonomi Uni Eropa terhadap Ukraina dalam Teori The Rational Design of International Institutions

Dukungan ekonomi melalui *Macro-Financial Assistance (MFA)* memungkinkan Ukraina mempertahankan stabilitas fiskal di tengah penurunan penerimaan negara akibat perang. Dana ini digunakan untuk membiayai layanan publik penting dan mempertahankan nilai mata uang. Hal ini mencerminkan cakupan isu (*scope*) yang luas dalam desain institusi, karena Uni Eropa tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga stabilitas ekonomi sebagai fondasi pertahanan nasional (Koremenos et al., 2001). Penghapusan tarif ekspor-impor dan pembukaan akses pasar UE menunjukkan arah integrasi jangka panjang Ukraina dengan blok Eropa. Ini berfungsi sebagai insentif politik dan ekonomi yang sejalan dengan desain keanggotaan terbatas (*flexible membership*), sebagaimana dijelaskan dalam teori *Rational Design*. Distribusi bantuan dikoordinasikan oleh badan pusat seperti *European Commission*, yang menunjukkan peran penting sentralisasi (*centralization*) dalam memastikan efektivitas distribusi dan pengawasan bantuan ekonomi.

2.3.2 Dampak Dukungan Keamanan Uni Eropa terhadap Ukraina dalam

Teori The Rational Design of International Institutions

Melalui *European Peace Facility*, UE membiayai senjata, pelatihan, dan logistik untuk pasukan Ukraina. Bantuan ini meningkatkan daya tahan militer Ukraina secara langsung. Ini memperkuat argumen bahwa institusi dapat memperluas cakupan ke isu keamanan bila diperlukan, sebagaimana dalam teori *Rational Design* (Koremenos et al., 2001). Pengiriman bantuan militer dikoordinasikan oleh lembaga seperti EEAS dan *European Defence Agency*. Proses ini memperlihatkan fungsi sentralisasi dalam mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efisiensi bantuan internasional di bidang militer. Pengambilan keputusan untuk bantuan militer dilakukan berdasarkan konsensus Dewan Uni Eropa, mencerminkan elemen kontrol (*control*) dalam desain institusional, dimana keseimbangan antara efisiensi dan representasi menjadi pertimbangan utama.

2.3.3 Dampak Dukungan Politik Uni Eropa terhadap Ukraina dalam Teori

The Rational Design of International Institutions

Pemberian status kandidat anggota UE memperkuat posisi politik Ukraina di panggung internasional. Ini mencerminkan desain keanggotaan rasional yang bertahap, di mana negara non-anggota dapat menerima dukungan tanpa formal menjadi bagian dari institusi, sesuai dengan prinsip membership (Koremenos et al., 2001). Status kandidat juga berfungsi sebagai insentif untuk mempercepat reformasi demokrasi, supremasi hukum, dan transparansi pemerintahan Ukraina, yang mendukung penguatan kelembagaan domestik.

Keputusan bersama negara-negara UE dalam mendukung posisi politik Ukraina menunjukkan adanya sistem kontrol kolektif yang menjaga kesatuan posisi di tengah beragam kepentingan anggota.

2.3.4 Dampak Dukungan Kemanusiaan Uni Eropa terhadap Ukraina dalam

Teori The Rational Design of International Institutions

UE memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pengungsi Ukraina secara serempak di semua negara anggota. Ini menunjukkan fleksibilitas (*flexibility*) institusi dalam merespons krisis secara cepat tanpa mengubah struktur hukum utama (Koremenos et al., 2001). Kecepatan dan skalabilitas dukungan kemanusiaan menunjukkan *adaptive flexibility* dari Uni Eropa, yaitu kemampuan untuk merespons situasi tidak terduga tanpa membebani struktur formal institusi.

BAB III

ANALISIS DUKUNGAN UNI EROPA TERHADAP UKRAINA BERDASARKAN TEORI *THE RATIONAL DESIGN OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS*

Pada Bab ini akan membahas bagaimana bentuk dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina dapat dianalisis melalui elemen-elemen utama dari teori *The Rational Design of International Institutions*, yaitu *membership* (keanggotaan), *scope* (cakupan isu), *centralization* (sentralisasi), *control* (kontrol pengambilan keputusan), dan *flexibility* (fleksibilitas institusi). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara sistematis bagaimana dan mengapa Uni Eropa mengambil peran aktif dalam mendukung Ukraina selama eskalasi konflik dengan Rusia pada tahun 2022–2024. Setiap elemen teori akan dikaji berdasarkan kebijakan konkret yang diambil oleh Uni Eropa, mulai dari pemberian status kandidat keanggotaan, hingga bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Bab ini juga menelaah peran institusional dan koordinatif Uni Eropa sebagai aktor internasional yang responsif dalam merespons krisis geopolitik yang kompleks, serta dampaknya terhadap stabilitas regional dan arah integrasi Ukraina ke dalam struktur politik dan ekonomi Eropa.

3.1 *Membership* Ukraina dalam Pemberian Kandidat Keanggotaan Uni Eropa

Status *membership* atau keanggotaan Ukraina dalam Uni Eropa mengalami kemajuan signifikan sejak dimulainya eskalasi konflik dengan Rusia pada tahun 2022. Pada 23 Juni 2022, Dewan Eropa secara resmi memberikan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina, sebuah langkah bersejarah yang mencerminkan

solidaritas politik sekaligus strategi geopolitik dalam menghadapi agresi Rusia. Keputusan ini tidak hanya menjadi simbol dukungan politik terhadap Ukraina, tetapi juga menunjukkan bahwa Ukraina dipandang memiliki prospek integrasi jangka panjang ke dalam tatanan politik, ekonomi, dan hukum Uni Eropa (*European Council, 2022:12*). Pemberian status kandidat ini dilakukan setelah Ukraina secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan pada 28 Februari 2022, hanya beberapa hari setelah invasi penuh Rusia dimulai. Respon cepat dari Uni Eropa mencerminkan urgensi untuk memberikan jaminan politik dan ekonomi kepada Ukraina, serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan nasional. Uni Eropa menekankan bahwa meskipun status kandidat telah diberikan, proses menuju keanggotaan penuh tetap mensyaratkan reformasi institusional, supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan penyesuaian terhadap regulasi Uni Eropa (*European Commission, 2022:10*).

Pemberian status kandidat keanggotaan Uni Eropa kepada Ukraina dan keterlibatan negara tersebut dalam berbagai skema bantuan merupakan wujud nyata dari dukungan strategis Uni Eropa yang didasari pada kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan kawasan. Langkah ini mencerminkan bahwa Uni Eropa tidak hanya memposisikan Ukraina sebagai mitra sementara dalam situasi konflik, melainkan sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk memperluas stabilitas dan integrasi kawasan Eropa Timur. Dengan memberikan status kandidat, Uni Eropa mengirimkan pesan tegas kepada Rusia bahwa Ukraina berada dalam lingkup pengaruh Eropa, sekaligus mengafirmasi komitmennya terhadap perluasan tatanan demokratis yang berbasis hukum internasional (*European Parliament, 2023:14*).

Selain pemberian status kandidat keanggotaan pada tahun 2022, Uni Eropa memberikan berbagai bentuk dukungan lain kepada Ukraina yang masih termasuk dalam kategori *membership* dalam pengertian terbatas dan fungsional. Bentuk dukungan ini mencakup keterlibatan Ukraina dalam sejumlah kebijakan dan program Uni Eropa tanpa harus menjadi anggota penuh. Misalnya, Ukraina telah menjalin kerja sama ekonomi mendalam melalui *EU-Ukraine Association Agreement* dan *Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)* yang memberikan akses luas ke pasar tunggal Uni Eropa. Selain itu, Ukraina secara aktif menyesuaikan regulasi domestiknya dengan standar hukum Uni Eropa (*acquis communautaire*), yang menunjukkan bentuk *keanggotaan normatif* melalui penyesuaian kebijakan. Bentuk-bentuk keanggotaan ini sesuai dengan konsep *flexible membership* dalam teori *The Rational Design of International Institutions*, yang menyatakan bahwa institusi internasional dapat merancang bentuk keanggotaan bertahap atau terbatas guna menghindari risiko enforcement dan mengelola ketidakpastian preferensi calon anggota (Koremenos et al., 2001). Dengan demikian, meskipun Ukraina belum menjadi anggota penuh Uni Eropa, negara tersebut telah menjadi bagian dari struktur kelembagaan melalui model keanggotaan fungsional yang **dirancang secara rasional dan strategis**.

Membership menekankan bahwa keanggotaan dalam suatu institusi internasional tidak bersifat statis atau seragam, tetapi dapat dirancang secara fleksibel dan bertahap untuk menyesuaikan dengan tujuan institusi dan kondisi negara calon anggota. Koremenos, Lipson, dan Snidal (2001) menyatakan bahwa keanggotaan dapat dibuka secara selektif ketika terdapat ketidakpastian preferensi,

kapasitas, atau risiko enforcement. Dalam konteks Uni Eropa, dinamika keanggotaan Ukraina mencerminkan desain keanggotaan yang inklusif namun bersyarat. Ukraina bukan anggota penuh, tetapi sejak 2022 telah diberikan status kandidat keanggotaan, hasil dari diskusi politik di level *European Council* yang terdiri dari kepala negara atau pemerintahan negara-negara anggota. Keputusan ini merupakan bentuk konsensus strategis yang dibangun melalui negosiasi panjang di antara negara anggota dengan mempertimbangkan nilai normatif, kepentingan geopolitik, dan kesiapan institusional Ukraina. Diskusi mengenai keanggotaan Ukraina juga melibatkan *European Commission*, yang bertugas memberikan evaluasi teknis terkait kelayakan dan kemajuan reformasi Ukraina. Selain itu, *European Parliament* turut berperan dalam memberi tekanan politik dan legitimasi terhadap keputusan tersebut. Dinamika diskusinya mencakup pertimbangan antara negara anggota yang mendukung perluasan UE untuk memperkuat pengaruh politik Eropa, dan negara yang lebih berhati-hati terhadap risiko integrasi prematur. Dalam kerangka teori *Rational Design*, hal ini mencerminkan bahwa proses keanggotaan bukan sekadar administratif, tetapi bagian dari kalkulasi rasional kolektif untuk mengelola kepentingan, ketidakpastian, dan stabilitas institusional melalui desain keanggotaan yang adaptif. Dengan demikian, pemberian status kandidat dan partisipasi Ukraina dalam berbagai program UE merupakan wujud dari dinamika keanggotaan yang dikelola secara rasional oleh lembaga-lembaga utama UE dalam merespons krisis geopolitik.

Menurut *European Commission* (2023) “*Candidate countries may benefit from EU support not only in reforms and institutional development but also in times of*

exceptional crisis, particularly where regional stability is at stake” (hal. 14). Ini berarti bahwa walaupun Ukraina belum menjadi anggota resmi, UE tetap memiliki hak politik dan legal untuk memberikan bantuan ekonomi, militer, dan kemanusiaan—termasuk melalui skema seperti *Macro-Financial Assistance (MFA)*, *European Peace Facility (EPF)*, dan *Temporary Protection Directive (TPD)*—atas dasar status kandidat dan kemitraan strategis. Dukungan ini diperkuat oleh pernyataan dalam *European Parliament Resolution* yang menyebutkan bahwa, “*The EU recognises Ukraine’s candidate status as a commitment not only to future membership but also to closer immediate cooperation in security, governance, and economic resilience*” (European Parliament, 2023:19). Dengan kata lain, status kandidat memberikan landasan politis dan kebijakan bagi UE untuk bertindak secara aktif, meskipun tanpa kewajiban pertahanan formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 42.7 TEU yang berlaku bagi anggota penuh.

3.2 Scope Uni Eropa dalam Eskalasi Konflik Rusia Ukraina di Berbagai Sektor

Dalam konteks dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina, perluasan cakupan isu tidak dimulai hanya sejak Ukraina memperoleh status kandidat keanggotaan pada tahun 2022. Sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014, Uni Eropa telah memulai intervensi melalui sanksi ekonomi, kerja sama politik, dan penandatanganan *EU–Ukraine Association Agreement*. Namun, pasca invasi penuh Rusia pada Februari 2022, cakupan dukungan UE berkembang secara signifikan dan lebih terintegrasi.

Dukungan tersebut mencakup berbagai sektor seperti ekonomi melalui *Macro-Financial Assistance*, keamanan melalui *European Peace Facility*, kemanusiaan

melalui *Temporary Protection Directive*, serta politik melalui pemberian status kandidat keanggotaan. Bahkan, Ukraina juga dilibatkan dalam program riset seperti *Horizon Europe*. Perluasan ini selaras dengan argumen Koremenos dkk. (2001) yang menyatakan bahwa “*institutions may be designed with a broader scope when there are gains from issue linkage or when multiple issues are interdependent, especially in complex cooperation problems*” (hal. 770). Dengan demikian, cakupan dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina merupakan hasil dari desain institusional yang rasional untuk menghadapi krisis multidimensi secara **komprehensif**.

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 telah mendorong Uni Eropa (UE) untuk memperluas cakupan atau *scope* dukungannya terhadap Ukraina dalam berbagai sektor kebijakan internasional. Cakupan dukungan ini menunjukkan bahwa Uni Eropa menerapkan pendekatan lintas sektor yang terstruktur dan terintegrasi, yang tidak hanya didorong oleh kebutuhan pragmatis akibat perang, tetapi juga oleh visi jangka panjang untuk menjadikan Ukraina sebagai bagian integral dari komunitas politik dan ekonomi Eropa. Seperti yang ditegaskan oleh European External Action Service, “*EU support to Ukraine extends beyond immediate crisis management, encompassing governance, defense, energy, and institutional reforms, paving the way for accession readiness and strategic integration*” (EEAS, 2023:11).

Pada kasus Ukraina, Uni Eropa tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan finansial, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mengintegrasikan Ukraina ke dalam berbagai kerangka kelembagaan regional, mencakup aspek ekonomi makro, pertahanan, politik, tata kelola, dan penanganan krisis kemanusiaan. Secara

ekonomi, Uni Eropa mengaktifkan serangkaian instrumen bantuan keuangan luar biasa, mulai dari *Macro-Financial Assistance (MFA)* hingga pendanaan sektor publik dan infrastruktur melalui *Ukraine Facility*, yang mencapai komitmen lebih dari €50 miliar (European Commission, 2023:22).

Dalam bidang keamanan dan militer, melalui *European Peace Facility (EPF)* dan misi pelatihan *EUMAM Ukraine*, UE mengalokasikan dana lebih dari €6 miliar untuk pembelian peralatan militer dan pelatihan pasukan Ukraina, yang sebelumnya tidak termasuk dalam cakupan umum kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap negara non-anggota (European Defence Agency, 2024:17). Di sektor kemanusiaan, UE mengambil langkah historis dengan mengaktifkan *Temporary Protection Directive (TPD)*—untuk pertama kalinya sejak diberlakukan—yang memberikan perlindungan langsung kepada jutaan pengungsi Ukraina di negara anggota UE (European Parliament, 2023:17). Selain itu, di ranah politik dan kelembagaan, Ukraina juga dimasukkan ke dalam jalur reformasi dan integrasi melalui kerangka kerja *EU-Ukraine Association Agreement* serta *European Neighbourhood Policy (ENP)*, yang semakin mengukuhkan posisinya dalam arsitektur politik regional Eropa.

Uni Eropa (UE) memberikan bantuan besar-besaran kepada Ukraina selama eskalasi konflik 2022–2024 bukan hanya sebagai bentuk solidaritas moral, tetapi juga didorong oleh pertimbangan strategis dan kepentingan jangka panjang. Secara normatif, bantuan tersebut mencerminkan komitmen UE terhadap nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan negara, yang secara prinsipil diancam oleh agresi Rusia (European Council, 2022:12). Namun,

dibalik nilai-nilai itu, terdapat juga kepentingan politik yang kuat untuk mempertahankan stabilitas kawasan Eropa Timur, mengurangi pengaruh Rusia di perbatasan UE, serta memperkuat keamanan energi dan politik internal UE sendiri. Seperti dinyatakan dalam dokumen resmi European External Action Service, "*the support to Ukraine is not only a matter of solidarity but a strategic investment in European and global security architecture*" (EEAS, 2023:15).

3.3 Centralization Enforcement Uni Eropa terhadap Negara-Negara Pendukung Ukraina

Uni Eropa (UE) telah menerapkan kebijakan sentralisasi yang signifikan terhadap negara-negara anggotanya dalam mendukung Ukraina, terutama setelah eskalasi Rusia pada tahun 2022. Salah satu langkah utama adalah implementasi sanksi ekonomi yang dirancang untuk melemahkan kemampuan Rusia dalam mendanai perang. Selain itu, UE telah sepakat untuk menyediakan dana bantuan yang signifikan bagi Ukraina. Pada Oktober 2023, blok tersebut menyetujui bantuan sebesar 50 miliar euro (sekitar Rp838 triliun) untuk periode 2024 hingga 2027. Beberapa negara anggota, seperti Hongaria, menunjukkan keberatan terhadap pengiriman bantuan militer ke Ukraina, dengan alasan bahwa langkah tersebut dapat memperburuk eskalasi konflik.

Dalam konteks dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina, bentuk sentralisasi tidak hanya muncul sejak Ukraina memperoleh status kandidat keanggotaan pada tahun 2022, melainkan telah berlangsung jauh sebelumnya. Sejak konflik dimulai pada 2014, Uni Eropa telah menggunakan lembaga pusat seperti *European Commission* dan *European External Action Service* (EEAS) untuk menyusun sanksi terhadap

Rusia, menyalurkan bantuan ekonomi, serta menjalin koordinasi diplomatik. Akan tetapi, sejak eskalasi penuh Rusia pada 2022, tingkat sentralisasi meningkat secara signifikan. Pengelolaan bantuan militer dilakukan melalui mekanisme *European Peace Facility* (EPF) yang dikoordinasikan oleh lembaga UE, sementara bantuan kemanusiaan disalurkan melalui *EU Civil Protection Mechanism* di bawah arahan terpusat. Peran lembaga pusat dalam mengelola berbagai bentuk dukungan ini mencerminkan penerapan nyata dari prinsip sentralisasi dalam teori desain institusi rasional. Seperti dijelaskan Koremenos dkk. (2001), "*Institutions with greater centralization facilitate coordination by reducing transaction costs and enabling more efficient decision-making processes*" (hal. 770). Dengan demikian, bentuk dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina telah memperlihatkan struktur yang terpusat bahkan sebelum status kandidat diberikan, dan menjadi semakin intensif sejak 2022 sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas krisis.

Lembaga-lembaga ini tidak memaksa negara anggota secara langsung, tetapi melalui mekanisme pengambilan keputusan kolektif dan kerangka hukum UE, mereka menciptakan kewajiban bersama yang mengikat, sehingga negara anggota memiliki tanggung jawab institusional untuk mendukung keputusan bersama. Setelah keputusan diambil, pelaksanaannya dipantau secara berkala melalui laporan, audit, dan mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pusat, menciptakan sistem pengawasan internal yang memastikan tingkat kepatuhan dan konsistensi antar anggota dalam mendukung Ukraina.

Dalam upaya meningkatkan respons terhadap situasi di Ukraina, UE juga mengalihkan dana bunga dari aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung

pengadaan alat utama sistem senjata dan stimulasi industri pertahanan Ukraina. Langkah ini diambil setelah UE sepakat mengirimkan dana tambahan sebesar 1,4 miliar euro dalam beberapa bulan ke depan, dengan tujuan memperkuat kapabilitas pertahanan Ukraina. Secara keseluruhan, kebijakan sentralisasi Uni Eropa dalam mendukung Ukraina mencerminkan upaya kolektif untuk menanggapi agresi Rusia. Namun, perbedaan pandangan di antara negara anggota menyoroti tantangan dalam mencapai konsensus dan efektivitas dalam kebijakan luar negeri dan keamanan UE.

Dalam Uni Eropa, konsep *centralization* dilakukan oleh sejumlah lembaga supranasional utama yang bertugas mengoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan bersama negara-negara anggota. Di dalam struktur UE, *European Commission* berperan sebagai badan eksekutif utama yang bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan, mengelola anggaran, serta memastikan pelaksanaan kebijakan UE secara seragam di seluruh negara anggota (European Commission, 2023:20). Komisi ini juga memiliki tugas penting dalam mengawasi implementasi sanksi terhadap Rusia dan distribusi bantuan ke Ukraina selama eskalasi konflik. Selain itu, *European Parliament* yang dipilih langsung oleh warga negara anggota, bersama dengan *Council of the European Union* (sering disebut sebagai Dewan Menteri), berbagi fungsi legislatif dan pengawasan terhadap Komisi. Dalam bidang hukum, *Court of Justice of the European Union (CJEU)* memastikan penerapan dan interpretasi hukum Uni Eropa yang seragam. Lembaga penting lainnya adalah *European Central Bank (ECB)* yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di zona euro, dan *European External Action Service (EEAS)* yang mengoordinasikan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. *European*

Council, yang terdiri dari kepala negara atau pemerintahan negara anggota, bertindak sebagai pengarah politik tertinggi UE (European Council, 2022:13).

3.4 Control Uni Eropa terhadap Hak Keputusan Kolektif dalam Konsensus Ukraina

Koremenos, Lipson, dan Snidal (2001) menyatakan bahwa keanggotaan dapat dirancang secara fleksibel—baik penuh, asosiatif, bertahap, atau bersyarat—untuk mengakomodasi ketidakpastian preferensi serta risiko moral hazard dan non-compliance (Koremenos et al., 2001, p. 768). Dalam konteks Uni Eropa dan Ukraina, pemberian status kandidat keanggotaan pada 23 Juni 2022 merupakan bentuk *conditional membership* yang mencerminkan kalkulasi rasional institusi terhadap nilai strategis dan risiko geopolitik. Keputusan ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan melewati mekanisme *voting* di *European Council*, yang dalam isu keanggotaan mensyaratkan konsensus dari semua 27 negara anggota (European Council Conclusions, 2022).

Bukti formal mengenai proses tersebut tercermin dalam dokumen resmi *European Council* (2022), yang menyatakan bahwa “*The European Council has decided to grant the status of candidate country to Ukraine and Moldova*” setelah melalui debat intensif antar kepala negara/pemerintahan. Diskusi internal berlangsung sejak Maret 2022, ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara resmi mengajukan permohonan akses, dan didukung oleh negara-negara seperti Polandia, Lithuania, dan negara Baltik. Di sisi lain, beberapa negara seperti Jerman, Belanda, dan Prancis awalnya menunjukkan sikap hati-hati terhadap percepatan proses, mengingat kebutuhan reformasi internal Ukraina dan standar

tata kelola UE (Euractiv, 2022). Namun, tekanan politik, solidaritas atas agresi Rusia, serta pendekatan berbasis kepentingan bersama mendorong konsensus penuh dicapai melalui *voting* informal dan negosiasi bilateral, sebagaimana dijelaskan oleh *European Council* President Charles Michel.

Dalam Uni Eropa, pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (*Common Foreign and Security Policy/CFSP*) mengharuskan persetujuan secara bulat dari seluruh negara anggota. Artinya, untuk mengadopsi suatu kebijakan 100% dari negara anggota harus setuju terhadap keputusan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 24 (1) dan Pasal 31 (1) dari Traktat Uni Eropa (*Treaty on European Union/TEU*) berasal dari Traktat Lisbon, yang ditandatangani pada 13 Desember 2007 dan mulai berlaku pada 1 Desember 2009 yang menyatakan bahwa keputusan dalam bidang CFSP harus diambil secara bulat oleh Dewan Uni Eropa.

Ini dikenal sebagai prinsip *unanimity* dan mencerminkan bahwa tidak ada negara yang secara formal memiliki suara lebih tinggi daripada yang lain. Sementara itu, untuk sebagian besar kebijakan Uni Eropa di luar bidang luar negeri seperti kebijakan ekonomi, perdagangan, lingkungan, dan pasar internal pengambilan keputusan dilakukan menggunakan sistem *Qualified Majority Voting* (QMV). Dalam sistem ini, keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh setidaknya 55% dari negara anggota (yakni minimal 15 dari 27 negara saat ini), yang secara kolektif mewakili 65% dari total populasi Uni Eropa. Meskipun secara formal tidak ada satu negara pun yang memiliki suara superior dalam sistem ini, dalam praktiknya negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis memiliki pengaruh

politik dan diplomatik yang sangat besar dalam proses negosiasi. Negara-negara ini sering memainkan peran sebagai penggerak dalam inisiatif besar UE, sehingga opini mereka memiliki bobot lebih dalam pembentukan konsensus.

Dalam pengambilan keputusan terkait dukungan terhadap Ukraina, Uni Eropa mencapai hasil dimana seluruh negara anggota menyatakan setuju terhadap berbagai paket bantuan dan kebijakan sanksi terhadap Rusia. Menurut *European Council* (2022), seluruh negara anggota menyetujui bantuan ke Ukraina karena agresi Rusia dinilai bukan hanya sebagai ancaman terhadap Ukraina, tetapi juga terhadap tatanan hukum internasional, kedaulatan negara, serta stabilitas politik seluruh kawasan Eropa (European Council, 2022:14). Negara-negara anggota memahami bahwa membiarkan Ukraina tanpa dukungan berarti meningkatkan ketidakstabilan di kawasan, membuka peluang perluasan konflik, dan memperbesar ancaman keamanan bagi Uni Eropa sendiri. Oleh karena itu, terdapat konsensus bahwa stabilitas Ukraina adalah bagian integral dari stabilitas Eropa, sehingga dukungan bukan hanya tindakan altruistik, melainkan investasi dalam keamanan kolektif (European External Action Service, 2023:17).

Peran *European Commission* sangat penting dalam proses ini. Lembaga ini menyusun *Opinion Report on Ukraine's Membership Application* yang menjadi dasar objektif bagi *European Council* untuk melakukan diskusi teknis dan *voting* politik. Laporan tersebut merekomendasikan status kandidat dengan syarat bahwa Ukraina melakukan reformasi di sektor peradilan, anti-korupsi, media, dan supremasi hukum (European Commission, 2022). Dengan demikian, dari sudut pandang *The Rational Design*, proses pemberian status kandidat kepada Ukraina

membuktikan bahwa keanggotaan bukanlah proses simbolis semata, melainkan hasil dari mekanisme formal termasuk *voting* antar negara anggota, evaluasi teknokratik oleh lembaga pusat, serta pertimbangan rasional terhadap insentif dan risiko institusi.

3.5 *Flexibility* Institusi Internasional Uni Eropa pada Perubahan Geopolitik dalam Mendukung Ukraina

Dalam menghadapi perubahan geopolitik yang cepat dan dinamis akibat eskalasi konflik Rusia–Ukraina sejak 2022, Uni Eropa menerapkan kebijakan fleksibilitas institusional merupakan mekanisme penting yang memungkinkan UE untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika politik internasional dan krisis yang tak terduga, seperti konflik Rusia–Ukraina untuk memastikan efektivitas respons dan ketahanan kelembagaannya. Fleksibilitas ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan baru di lapangan, dengan prinsip *The Rational Design of International Institutions* yang menyatakan bahwa institusi yang efektif harus mampu beradaptasi terhadap ketidakpastian eksternal (Koremenos, Lipson, & Snidal, 2001:775).

Koremenos, Lipson, dan Snidal (2001) menjelaskan bahwa institusi internasional dirancang secara rasional agar mampu menghadapi ketidakpastian dan dinamika lingkungan global, baik melalui *adaptive flexibility* (respon jangka pendek) maupun *transformative flexibility* (penyesuaian jangka panjang). Dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina, meskipun negara tersebut bukan anggota resmi UE, mencerminkan penerapan fleksibilitas adaptif, yaitu kemampuan institusi untuk merespons situasi darurat seperti invasi Rusia tanpa harus terlebih

dahulu mengubah kerangka keanggotaan atau membuat perjanjian baru. Uni Eropa menggunakan mekanisme yang sudah ada—seperti *European Peace Facility*, *Macro-Financial Assistance*, dan *Temporary Protection Directive*—untuk memperluas manfaatnya kepada aktor eksternal secara cepat dan efisien. Pendekatan ini menggambarkan bahwa keanggotaan formal bukan satu-satunya parameter dalam desain institusi modern, melainkan bahwa kerja sama dan dukungan dapat dilakukan melalui jalur fleksibel jika terdapat konvergensi kepentingan strategis dan nilai normatif bersama. Dengan demikian, bantuan kepada Ukraina mencerminkan prinsip rasional institusional yang menempatkan efektivitas dan stabilitas sebagai prioritas, **tanpa dibatasi oleh rigiditas keanggotaan formal.**

Di dalam kerangka Uni Eropa, kebijakan fleksibilitas ini tercermin dalam penerapan instrumen-instrumen seperti *Temporary Protection Directive (TPD)* diaktifkan untuk memberikan perlindungan cepat kepada jutaan pengungsi Ukraina tanpa melalui prosedur suaka yang panjang, perluasan mandat *European Peace Facility (EPF)* diperluas agar dapat langsung membiayai pengiriman bantuan militer ke Ukraina termasuk pengiriman peralatan militer dan pelatihan pasukan, serta penyesuaian skema *Macro-Financial Assistance (MFA)* disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan fiskal mendesak Ukraina dalam menjaga stabilitas ekonomi ditengah perang, Uni Eropa memberikan paket bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dan hibah, yang bertujuan membantu Ukraina membiayai layanan publik, menjaga sektor keuangan tetap berjalan, serta mendukung reformasi struktural jangka panjang.

Seluruh kebijakan tersebut mencerminkan kemampuan adaptif Uni Eropa dalam mengelola kebijakan lintas sektor yang kompleks, sekaligus memperkuat integrasi strategis dengan Ukraina. Dengan kebijakan fleksibel ini, Uni Eropa tidak hanya mempertahankan efektivitas kelembagaannya dalam situasi krisis, tetapi juga membuktikan bahwa desain institusional yang responsif menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan geopolitik masa kini.

Fleksibilitas institusional UE tampak jelas ketika TPD—yang telah lama ada namun belum pernah diaktifkan—digunakan untuk memberikan perlindungan cepat kepada jutaan pengungsi Ukraina tanpa harus mengubah secara permanen kebijakan suaka Eropa (European Parliament, 2023:11). Di sektor pertahanan, EPF yang semula dirancang untuk bantuan non-militer, dengan cepat disesuaikan untuk mendanai pengiriman senjata ke Ukraina (European Defence Agency, 2024:14). Dalam bidang keuangan, MFA yang biasanya diberikan dalam syarat ketat, diadaptasi dengan prosedur yang lebih longgar untuk mengalirkan €50 miliar bantuan ke Ukraina melalui *Ukraine Facility* pada tahun 2024 (European Commission, 2024:19).

Kebijakan fleksibilitas ini memungkinkan UE tetap efektif dalam situasi darurat tanpa harus merombak struktur dasarnya, sekaligus menunjukkan bahwa fleksibilitas adalah bagian integral dari desain rasional institusi modern. Dengan menggunakan mekanisme adaptif ini, Uni Eropa mampu menjaga kohesivitas internal sekaligus mempertahankan kredibilitas eksternal ditengah perubahan politik yang cepat.

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab ini merangkum keseluruhan temuan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Uni Eropa dalam memberikan dukungan terhadap Ukraina selama eskalasi konflik Rusia-Ukraina pada periode 2022 hingga 2024. Bab ini akan membahas dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian kesimpulan, akan dijelaskan bahwa selama periode tersebut, Uni Eropa tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk bantuan ekonomi, keamanan, politik, dan kemanusiaan yang terintegrasi, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dalam merespons perubahan geopolitik yang dinamis. Dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina tercermin dalam berbagai kebijakan dan mekanisme yang mengadaptasi kondisi yang terus berubah, mulai dari pemberian status kandidat keanggotaan hingga penguatan kapasitas pertahanan Ukraina. Dalam dimensi teoritis, penerapan elemen-elemen dari *The Rational Design of International Institutions* seperti *membership*, *scope*, *centralization*, *control*, dan *flexibility* memperlihatkan bagaimana Uni Eropa merespons tantangan ini secara sistematis. Bab ini juga akan memberikan rekomendasi untuk Uni Eropa dan Ukraina, serta saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan kebijakan Uni Eropa terhadap negara kandidat lainnya dalam konteks situasi konflik.

4. 1 Kesimpulan

Selama eskalasi konflik Rusia–Ukraina tahun 2022–2024, Uni Eropa memberikan dukungan komprehensif kepada Ukraina yang mencakup bidang ekonomi, keamanan, politik, dan kemanusiaan secara terintegrasi. Dalam sektor

ekonomi, Uni Eropa menyalurkan bantuan melalui *Macro-Financial Assistance (MFA)* dan membentuk *Ukraine Facility* dengan total bantuan lebih dari €50 miliar untuk menjaga stabilitas fiskal, membiayai sektor publik, serta mendukung rekonstruksi pascaperang (European Commission, 2024:19). Di bidang keamanan, Uni Eropa memperkuat kapasitas pertahanan Ukraina melalui perluasan *European Peace Facility (EPF)* yang mendanai pengadaan peralatan militer dan pelatihan pasukan, serta melakukan koordinasi erat dengan NATO untuk meningkatkan kesiapan operasional Ukraina (European Defence Agency, 2024:14). Dalam ranah politik, Uni Eropa meningkatkan hubungan dengan memberikan status kandidat keanggotaan kepada Ukraina dan mendorong reformasi kelembagaan yang memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang transparan (European Council, 2022:12). Sementara itu, di sektor kemanusiaan, Uni Eropa mengaktifkan *Temporary Protection Directive (TPD)* untuk melindungi jutaan pengungsi Ukraina, serta menyediakan bantuan kemanusiaan darurat melalui *EU Civil Protection Mechanism* untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam dan luar Ukraina (European Parliament, 2023:11). Dukungan yang luas di empat bidang ini menunjukkan komitmen strategis Uni Eropa untuk tidak hanya membantu Ukraina bertahan, tetapi juga memperkuat fondasinya sebagai bagian integral dari komunitas demokratis Eropa.

Uni Eropa terhadap Ukraina dalam eskalasi konflik 2022–2024 dapat dijelaskan secara sistematis melalui elemen-elemen teori *The Rational Design of International Institutions*. Dalam aspek *membership*, pemberian status kandidat keanggotaan kepada Ukraina menunjukkan komitmen politik dan strategis Uni

Eropa terhadap integrasi kawasan Eropa Timur. Dari sisi *scope*, Uni Eropa memperluas cakupan dukungannya ke berbagai sektor, mulai dari ekonomi, militer, politik, hingga kemanusiaan, mencerminkan respons yang terstruktur dan multidimensional terhadap krisis. Pada dimensi *centralization*, lembaga-lembaga utama UE seperti *European Commission* berperan aktif dalam mengoordinasikan keputusan kolektif dan implementasi kebijakan secara terpusat. Sementara itu, dalam elemen *control*, mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus, menunjukkan pentingnya persetujuan bulat seluruh negara anggota dalam mendukung kebijakan terhadap Ukraina. Akhirnya, pada aspek *flexibility*, Uni Eropa memperlihatkan kapasitas adaptif yang tinggi melalui aktivasi instrumen-instrumen seperti *Temporary Protection Directive (TPD)*, perluasan mandat *European Peace Facility (EPF)*, dan penyesuaian *Macro-Financial Assistance (MFA)* untuk merespons dinamika politik secara cepat dan efektif. Keseluruhan langkah ini menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina bukan hanya didorong oleh solidaritas moral, tetapi juga pertimbangan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan, memperkuat demokrasi, dan mempertahankan tatanan internasional berbasis hukum.

Namun, dalam penerapannya, muncul sejumlah masalah atau tantangan.

Pertama, meskipun status kandidat diberikan melalui konsensus politik negara anggota UE, proses akses formal bersifat jangka panjang dan kompleks. Ukraina masih menghadapi berbagai kendala struktural seperti korupsi, reformasi peradilan, serta ketidakstabilan keamanan akibat perang yang sedang berlangsung. *Kedua*, tidak semua negara anggota UE memiliki persepsi risiko dan kepentingan yang

sama terhadap perluasan keanggotaan. Hal ini menciptakan ketegangan internal antara negara yang mendukung perluasan cepat (misalnya negara-negara Baltik dan Polandia) dan negara yang lebih berhati-hati (seperti Jerman dan Prancis), yang khawatir akan beban institusional serta preseden politik bagi negara kandidat lain. *Ketiga*, pemberian status kandidat dalam situasi konflik menimbulkan perdebatan mengenai kriteria obyektif dan konsistensi prosedural, sehingga muncul tantangan terhadap legitimasi dan prediktabilitas mekanisme keanggotaan UE.

Dengan memberikan keanggotaan terbatas, UE dapat mendorong kepatuhan Ukraina terhadap prinsip-prinsip institusi tanpa harus langsung menanggung seluruh konsekuensi dari keanggotaan penuh. Ini adalah contoh nyata bagaimana teori desain rasional dapat menjelaskan pemilihan bentuk keanggotaan sebagai respons terhadap ketidakpastian eksternal dan perbedaan preferensi internal dalam institusi internasional.

4. 2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina pada eskalasi konflik tahun 2022–2024, Uni Eropa perlu mempertahankan pendekatan fleksibel namun terkoordinasi dalam menghadapi dinamika geopolitik, khususnya untuk mengantisipasi perubahan situasi konflik yang cepat. Selain itu, transparansi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan perlu dijaga, agar dukungan yang diberikan benar-benar mencapai tujuan stabilitas dan pembangunan jangka panjang di Ukraina. Bagi Ukraina sendiri, penting untuk membuktikan kesiapan dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan sebagai syarat keanggotaan penuh di Uni Eropa. Untuk penelitian mendatang, diharapkan analisis

lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan model dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina dengan dukungan terhadap negara kandidat lainnya, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang pola kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam situasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aljazeera. (2022). *US Warns Russia of Economic Sanctions Amid Ukraine Tensions*. Doha: Aljazeera Publishing.
- Brown, M. (2022). *The Ukraine Crisis: Russia's Military Strategy and Global Reactions*. New York: Global Affairs Press.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koremenos, Barbara, Charles Lipson, and Duncan Snidal. 2001. *The Rational Design of International Institutions*. *International Organization* 55(4): 761–799.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Riduwan. 2004 : 104. *Metode observasi dan penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudjana, N. (2011). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Rajawali Press.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widiasa, B. (2018). *Modern Warfare: Strategy and Technology in 21st Century Conflicts*. Jakarta: Pustaka Militer Indonesia.
- Yusuf, Muri A. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabunga*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

- Anderson, K. (2023). *EU's Strategic Response to the Ukraine Crisis*. *International Journal of European Studies*.
- Hutabarat, L. F. (2022). *Diplomasi Indonesia pada Indo-Pacific Economic Framework*. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 6(2), 85-97.
- Idris, F. N., & Mu'tashim, M. R. (2023). *Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas Pelanggaran Teritorial Ukraina: Pendekatan Multi-Tujuan*. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(01), 16-38.
- Massaguni, M., Badu, M. N., & Sallatu, M. A. (2022). *Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina*. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 43-67.
- Martin, A., & Al Farizi, S. (2024). *Sikap Uni Eropa Terhadap Konflik Rusia dan Ukraina*. *Kajian Hubungan Internasional*, 3(1), 42-65.

- Muhammad, A., & Athifi, M. F. (2021). Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok. *Insignia: Journal of International Relations*, 8(2), 132-144.
- Munaiseche, R. (2022). Humanitarian Impact of the Ukraine Conflict: A UN Report. Geneva: United Nations Publications.
- Oxenstierna, Susanne & Olsson, Per, The economic sanctions against Russia: impact and prospects of success, *Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)*, Stockholm, 2015,
- Pattipeilhy, S. C. H., & Sitompul, Y. A. C. (2022). Perang Rusia-Ukraina, Gangguan Transportasi Multimoda, dan Kerawanan Rantai Pasokan Pangan Global. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 20(2), 56-68.
- Puspasari, I. (2020). Peran Uni Eropa sebagai Institusi Supranasional dalam Krisis Ukraina Tahun 2014-2019. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(01).
- Wan Wang, Impact of Western Sanctions on Russia in the Ukraine Crisis, *Journal of Politics and Law*, Vol. 8, No. 2; 2015, p. 4, doi: 10.5539/jpl.v8n2p1.
- Widiasa, R. (2018). "Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina." *Intermestic: Journal of International Studies*.

Website

- Aa.com.tr (2022) <https://www.aa.com.tr/id/dunia/uni-eropa-adopsi-paket-sanksi-baru-untuk-rusia/2704254> diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
- Al Jazeera. —Ukraine Cuts Diplomatic Ties with Russia after Invasion. *www.aljazeera.com*, <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/ukraine-breaks-diplomatic-ties-with-russia>. Diakses pada 3 Desember 2024.
- CNN Indonesia, PBB: Korban Tewas Invasi Rusia Ke Ukraina 816 Orang, 59 Anak-Anak (Jakarta, 2022) Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
- Council of the EU, „European Peace Facility: EU Support to Ukraine Increased to €2.5 Billion“, European Council, 2022, p. 1. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024
- Council of the EU. (2014b). Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine. The Council of the European Union and the European Council. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833> diakses pada tanggal 9 Desember 2024
- Dw.com (2022) <https://www.dw.com/id/eu-sepakati-sanksi-baru-zelensky-berterimakasih/a-61994105> diakses pada tanggal 9 Desember 2024
- EBRD. (2024). *Ukraine Investment Framework: Mobilizing Global Capital for Reconstruction*. London: European Bank for Reconstruction and Development, p. 21.

European Defence Agency. (2024). *Military Innovation and Defense Collaboration in the Russia-Ukraine War*. Brussels: EDA Reports, p. 9.

European Union. (2022). *EU Response to the Ukraine Crisis*. [Dokumen kebijakan UE].

European Council. (2014). *EU Sanctions Against Russia: Initial Measures in Response to Crimea Crisis*. Brussels: European Council Reports, p. 22.

European Commission. (2015). *Ukraine-EU Association Agreement and Its Economic Implications*. Brussels: European Commission, p. 18.

European Council. (2022). *Ukraine's EU Candidate Status and Its Implications for European Politics*. Brussels: European Council Reports.

European Commission. (2023). *EU Support for Ukraine: Economic and Humanitarian Assistance*. Brussels: European Commission.

European council on foreign relation (2023) <https://ecfr.eu/article/damage-done-ways-to-measure-european-sanctions-success-against-russia/> diakses pada tanggal 9 Desember 2024

European External Action Service. (2023). *Sanctions Against Russia and Their Impact on the War in Ukraine*. Brussels: EEAS Reports.

European Investment Bank. (2024). *Financing Ukraine's Recovery: EU Institutional Support*. Luxembourg: EIB Reports, p. 23.

European Parliament. (2024). *The Future of Ukraine in the European Union: Challenges and Opportunities*. Brussels: European Parliament, p. 12.

IMF. (2023). *Ukraine's Economic Stability Amidst Conflict: The Role of International Financial Support*. Washington D.C.: International Monetary Fund, p. 9.

Kompas (2022) <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/123000765/daftar-sanksi-yang-dijatuhkan-kepada-rusia-atas-invasi-ukraina-apa-saja-?page=all> diakses pada tanggal 9 Desember 2024

Morgenstern, E. M., & Brown, N. M. (2022). *Foreign Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy*. Congressional Research Service.

Munaiseche, A. R. (2022). "Alasan Rusia Melakukan Invasi Terhadap Ukraina." Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

NATO. (2022). *Joint NATO-EU Statement on the Ukraine War*.

NATO. (2023). *Joint NATO-EU Statement on the Ukraine War*. Brussels: NATO Publications.

Suara.com. (2024). *AS Izinkan Ukraina Gunakan Rudal Jarak Jauh di Rusia: Eskalasi Konflik atau Langkah Strategis?* <https://www.suara.com/news/2024/11/19/045500/as-izinkan-ukraina-gunakan-rudal-jarak-jauh-di-rusia-eskalasi-konflik-atau-langkah-strategis> diakses pada tanggal 9 Desember 2024

Tempo.com (2023). <https://dunia.tempo.co/read/1726556/kremlin-lacak-mata-mata-barat-setelah-video-cia-tersebar> diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

The conversation (2022). <https://theconversation.com/alasan-mengapa-sanksi-ekonomi-dan-kecaman-dunia-terhadap-rusia-tidak-akan-efektif-menghentikan-invasi-178159> diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

UNHCR. (2023). *Refugee Situation in Ukraine: EU's Humanitarian Response*. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.

United Nations. (2023). *EU and UN Cooperation in Humanitarian Aid and Conflict Resolution*. Geneva: UN Publications, p. 18.

US Department of State. (2024). *Supporting Ukraine's Economic Resilience and SME Growth*. Washington, D.C.: US Government Reports, p. 19.

World Bank. (2024). *Ukraine's Reconstruction Plan: Project Preparation and Prioritization*. Washington, D.C.: World Bank Publications, p. 14.